

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerajaan Arab Saudi merupakan negara terluas yang berada di kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki tiga belas wilayah administrasi yang disebut manatiq (provinsi). Masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh gubernur dan dewan daerah yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakatnya.¹ Bagi Arab Saudi kebijakan luar negerinya berfokus terhadap faktor geografis, sejarah, agama, ekonomi, politik yang dilandaskan atas prinsip-prinsip yang bersifat abadi dan faktual.² Selain itu, Arab Saudi merupakan negara yang menerapkan hukum syariat di negaranya, oleh sebab itu membuat Arab Saudi mengharuskan politik luar negerinya berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam. Bagi Kerajaan Arab Saudi politik luar negeri negaranya merupakan hal yang pokok, karena dalam praktiknya politik luar negeri akan menghasilkan kebijakan luar negeri yang dapat membentuk sistem pemerintahan negaranya, sehingga hal tersebut dapat membawa pengaruh bagi negaranya.³

Kebijakan luar negeri Arab Saudi yang terdepan adalah kebijakan *neighbour friendly*, kebijakan yang menekankan *non-intervensi* terhadap urusan internal negara lain, mempererat hubungan baik dengan negara-negara teluk dan negara-negara semenanjung Arab, serta mempererat hubungan dengan negara Arab Saudi,

¹ Law Gwillim, "Regions of Saudi Arabia," 2015, <https://www.statoids.com/usa.html>.

² Bureau of Near Eastern Affairs, *Background Note: Saudi Arabia* (2009).

³ The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia, "Saudi Arabia Basic Law of Governance," Saudi Embassy, 1992, <https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance>.

kemudian mengadvokasi permasalahan yang ada di negara-negara Semenanjung Arab, mengadopsi kebijakan *non blok*, menjalin kerja sama dengan negara - negara sahabat, memainkan peran efektif dalam organisasi - organisasi internasional dan regional.⁴ Kebijakan tersebut muncul diakibatkan dari beberapa aspek, seperti negara - negara teluk, negara - negara Arab, negara - negara islam, dan kalangan internasional.

Dalam menjalin hubungan luar negerinya, bagi Arab Saudi penting untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dengan negara lain salah satunya ialah Iran. Hubungan Arab Saudi dan Iran dimulai pada tahun 1929 yang ditandai dengan kesepakatan *Friendship Treaty*, yakni perjanjian kedua negara yang berisi tentang prinsip dasar dalam membuka hubungan politik, diplomatik, dan perdagangan.⁵ Hubungan kedua negara pada awalnya berjalan dengan harmonis hingga Desember 1943, ketika Arab Saudi mengeksekusi mati Abu Taleb Yazdi seorang jamaah haji asal Iran yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik kedua negara pada maret 1944.⁶ hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran terjalin kembali pada januari 1947, setelah Raja Arab Saudi Abd Al Aziz mengirimkan surat pribadinya kepada Shah Iran Muhammad Reza Pahlavi tentang pemulihan kembali hubungan diplomatik kedua negara. Semenjak saat itu hubungan kedua negara terus mengalami fluktuasi dengan terjadi kembali pemutusan dan pemulihan hubungan kedua negara.⁷ Dengan putusnya hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran menjadi konflik regional paling berpengaruh di Kawasan Timur

⁴ Sidiq Ahmadi Yesya Ichsanah Putri, "Alasan Pemerintah Arab Saudi Mendukung China dalam Kasus Diskriminasi Muslim Uighur," *Jurnal Pemikiran Politik Islam* Vol.4 No.2 (2021): 142.

⁵ Emir Hadzikadunic, "Iran – Saudi Ties: Can History Project Their," *National University of Singapore*, no. February (2019): 1.

⁶ Emir Hadzikadunic, "Iran–Saudi Ties: Can History Project Their Trajectory?," *Middle East Institute*, 22 Oktober 2019. 3-4.

⁷ Hadzikadunic, "Iran–Saudi Ties: Can History Project Their Trajectory?," 22 Oktober 2019.

Tengah, kedua negara menjadi saingan setelah Revolusi Iran 1979.⁸ Kerajaan Arab Saudi, yang mendasarkan legitimasi kekuasaannya pada Islam, merasa dominasi mereka di dunia Muslim terancam oleh pendirian Republik Islam Iran. Hubungan kedua negara memburuk sepanjang dekade 1980-an, terutama karena Arab Saudi secara diam-diam mendukung Irak selama Perang Iran-Irak.⁹ Ketegangan sedikit mereda di bawah Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997) dan Mohammad Khatami (1997-2005), yang berusaha memperbaiki hubungan Iran dengan negara-negara tetangganya.¹⁰ Namun, upaya mendekatkan hubungan terhenti pada 2005, ketika Presiden Mahmoud Ahmadinejad berkuasa.¹¹ Gerakan Arab Spring pada 2011 semakin memperburuk ketegangan, terutama di Bahrain, di mana umat Syiah berdemonstrasi menentang keluarga kerajaan Sunni. Arab Saudi mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan dan menyalahkan Iran atas kerusakan tersebut.

Tehran telah berusaha memperbaiki hubungan dengan Riyadh sejak terpilihnya Presiden Rouhani pada 2013. Namun, kedua negara berselisih mengenai konflik regional, terutama di Suriah dan Yaman. Pada September 2015, ratusan warga Iran tewas dalam insiden berdesakan selama ritual haji tahunan di Arab Saudi. Tehran menuduh Riyadh melakukan kelalaian, sementara pejabat Saudi menuduh Iran memanfaatkan tragedi tersebut untuk kepentingan politik. Setelah Arab Saudi mengeksekusi ulama Syiah Nimr al Nimr pada Januari 2016,

⁸ Ahmad Zainal Musofa, "Rekonsiliasi Arab Saudi dan Iran dalam Perspektif Konstruktivisme," *JRP (Jurnal Review Politik)* 13, no. 2 (2023): 75–99, <https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.2.75-99>.

⁹ Central Intelligence Agency, "Iran: Exporting the Revolution An Intelligence Assessment," dalam *Office of The Historian, United States Department of State* (1980).

¹⁰ National Intelligence Estimate, "Cia (1991) Gd- Nie-34-91 - Iran Under Rafsanjani - Seeking a New Role in the World Community.Pdf," preprint, Director of Central Intelligence, 1991.

¹¹ Mohammad Hossein Hafezian, "Iran-GCC Relations under President Ahmadinejad : 2005-2009," *Iranian Review of Foreign Affairs* 1, no. 4 (2011): 87–114.

demonstran menyerang kedutaan Saudi di Tehran. Akibatnya, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2016, pada saat warga melakukan demonstrasi yang berujung pada penyerangan kantor kedutaan Arab Saudi di Teheran dengan melempar bom botol dan taksi yang mereka tabrakkan di gedung konsuler Arab Saudi di Masyhad akibat dari eksekusi mati seorang ulama yang menganut pemahaman Syiah Yakni Nimr Al-Nimr oleh pemerintah Arab Saudi.¹² setelah memerintahkan para diplomatnya untuk segera meninggalkan Iran dan meminta kepada para Diplomat Iran untuk meninggalkan Arab Saudi dalam kurun waktu 48 jam. Kemudian Arab Saudi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatiknya dengan Iran untuk kesekian kalinya.¹³

Sejak saat itu, kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap Iran semakin bersifat konfrontatif dan berorientasi pada isolasi diplomatik. Faktor internal yaitu terganggunya hubungan bilateral kedua negara dengan putusnya hubungan perdagangan dan terhentinya lalu lintas penerbangan Arab Saudi ke Iran begitupun sebaliknya.¹⁴ Faktor eksternal yaitu negara-negara kawasan timur tengah mengambil langkah yang sama dengan Arab Saudi. Diantaranya, Bahrain, Sudan dan Djibouti ikut memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran sedangkan Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar dan Yordania dengan mengubah status

¹² Aryo Bimo Prasetyo Dkk., "Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi Arabia Dengan Iran Pasca Eksekusi Hukuman Mati Sheikh Nimr Al-Nimr," *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 1–15.

¹³ Prasetyo dkk., "Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi Arabia Dengan Iran Pasca Eksekusi Hukuman Mati Sheikh Nimr Al-Nimr."

¹⁴ Dewa Gede Sudika Mangku Dan Ni Putu Rai Yulianti, "Analisis Yuridis Status Seorang Diplomat Akibat Pemutusan Hubungan Diplomatik Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi Di Teheran)," *Perspektif* 26, No. 2 (2021): 129–38, <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V26i2.789>.

perwakilan diplomatik menjadi kuasa usaha atau *charge d'affaires* dengan Iran.¹⁵ Selain itu, serangan terhadap fasilitas minyak Saudi Aramco pada tahun 2019 menunjukkan kerentanan keamanan Arab Saudi meskipun telah mengadopsi strategi penangkalan keras terhadap Iran. Kondisi ini mendorong evaluasi internal terhadap efektivitas kebijakan luar negeri yang selama ini dijalankan.¹⁶

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2023 ketika Arab Saudi secara resmi mengumumkan normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran melalui kesepakatan yang di mediasi oleh Tiongkok. Keputusan ini menandai pergeseran penting dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi, dari pendekatan konfrontatif menuju pendekatan diplomatik dan kooperatif. Normalisasi tersebut tidak hanya mengakhiri tujuh tahun pemutusan hubungan diplomatik, tetapi juga mencerminkan perubahan strategi Arab Saudi dalam menghadapi dinamika keamanan dan politik regional.¹⁷

Perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi ini menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam studi hubungan internasional. Pertama, normalisasi Arab Saudi dan Iran mencerminkan adanya perubahan strategi negara dalam merespons kegagalan kebijakan sebelumnya dan tekanan lingkungan internasional. Selanjutnya, keterlibatan Tiongkok sebagai mediator menunjukkan pergeseran penting dalam tatanan global, di mana aktor non-Barat mulai memainkan peran signifikan dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Dan juga, kebijakan ini memiliki implikasi luas terhadap stabilitas kawasan, keamanan energi global, serta pola aliansi internasional Arab Saudi.

¹⁵ Prasetyo dkk., "Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi Arabia Dengan Iran Pasca Eksekusi Hukuman Mati Sheikh Nimr Al-Nimr."

¹⁶ Kristian Coates Ulrichsen, *The Gulf States in International Political Economy* (2016).

¹⁷ North Africa, *How Beijing Helped Riyadh and Tehran Reach a Detente*, no. March (2023): 1–6.

Masalah ini penting dan menarik untuk diteliti menjadi penelitian akhir agar bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi dalam menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi hubungan internasional dan juga memberikan perspektif strategis bagi pembuat kebijakan dalam memahami dinamika perubahan kebijakan luar negeri di kawasan yang penuh konflik.

1.2 Rumusan Masalah

Hubungan Arab Saudi dan Iran dimulai pada tahun 1929 yang ditandai dengan kesepakatan *Friendship Treaty*, yakni perjanjian kedua negara yang berisi tentang prinsip dasar dalam membuka hubungan politik, diplomatik, dan perdagangan.¹⁸ Hubungan kedua negara pada awalnya berjalan dengan harmonis hingga desember 1943, ketika Arab Saudi mengeksekusi mati Abu Taleb Yazdi seorang jamaah haji asal Iran yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik kedua negara pada maret 1944. hingga pada saat tahun 2016, warga Iran melakukan demonstrasi yang berujung pada penyerangan kantor kedutaan Arab Saudi di teheran, kemudian Arab Saudi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatiknya untuk kesekian kalinya. Dengan putusnya hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran menjadi konflik regional paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah dan berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, terlihat adanya dinamika hubungan Arab Saudi dan Iran yang ditandai oleh rivalitas historis, konflik regional, serta kebijakan luar negeri Arab Saudi

¹⁸ Emir Hadzikadunic, "Iran–Saudi Ties: Can History Project Their Trajectory?," *National University of Singapore*, 2019, 17.

yang semula bersifat konfrontatif namun kemudian mengalami perubahan signifikan menuju normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 2023. Hal ini penting dan menarik untuk diteliti dalam melihat perubahan kebijakan Arab Saudi dalam menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berikut “Apa faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan Arab Saudi dalam menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran.”

1.4 Tujuan Penelitian

Dari masalah penelitian di atas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang memengaruhi perubahan kebijakan Arab Saudi menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat untuk kedepannya yang dibagi menjadi dua jenis manfaat.

1.5.1 Manfaat Akademis

Dengan hasil analisis dari studi kasus yang diangkat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dan perbandingan penelitian selanjutnya terutama mahasiswa jurusan hubungan internasional terkait permasalahan apa faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan Arab Saudi menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Iran yang di prakarsai oleh Tiongkok demi penelitian yang lebih dalam lagi ke depannya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini semoga menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menambah referensi bacaan dan juga diharapkan menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan seperti pemerintah terutama kementerian luar negeri dalam memahami apa faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan Arab Saudi menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Iran jika nanti menghadapi masalah yang serupa.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian. Studi pustaka ini dicantumkan untuk menemukan pembaharuan bagi penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya yang tema atau permasalahannya relatif sama. Selain itu, studi pustaka juga bermanfaat bagi penulis untuk menemukan fokus arah penelitian serta sudut pandang yang digunakan. Oleh sebab itu, penelitian akan menjelaskan secara singkat dan jelas dari beberapa bahan bacaan seperti buku, buku elektronik, jurnal, artikel, dan bahan bacaan ilmiah lainnya.

Tulisan pertama yang menjadi rujukan dari Tianqi Yin pada tahun 2022 dengan judul, *“strong power to weak power strategic hedging in regional conflicts and China’s involvement in the Saudi Arabia – Iran rivalry”*.¹⁹ Tulisan ini memaparkan bagaimana keterlibatan Tiongkok dalam persaingan Arab Saudi-Iran yang sangat penting untuk memahami peran Tiongkok yang muncul di

¹⁹ Tianqi Yin, “Strong Power to Weak Power Strategic Hedging in Regional Conflicts and China’s Involvement in the Saudi Arabia-Iran Rivalry,” *International Journal of Asian Social Science* 12, no. 8 (2022): 292–307, <https://doi.org/10.55493/5007.v12i8.4560>.

timur tengah. Persaingan Arab Saudi – Iran telah lama menjadi konflik regional yang paling berpengaruh di Timur Tengah. Arab Saudi dan Iran, dua negara terkuat di dunia Arab, menjadi saingan setelah Revolusi Iran 1979.

Tiongkok telah menerapkan strategi “penyeimbangan” yang berfokus pada membangun hubungan yang baik dan bekerja sama dengan Arab Saudi dan Iran. Selama kunjungan Xi Jinping tahun 2016 ke wilayah tersebut, Tiongkok mengumumkan “kemitraan strategis menyeluruh” dengan Riyadh dan Teheran. Tiongkok telah berjanji untuk memperluas interaksi ekonomi secara besar-besaran dengan kedua negara Timur Tengah itu.

Timur Tengah rumah dari cadangan minyak terbesar di dunia, adalah pedagang energi terbesar dengan Tiongkok, sekitar setengah (47,1%) dari minyak mentah impor Tiongkok berasal dari sembilan negara Timur Tengah. Menurut basis data *Observatory of Economic Complexity* (OEC), Arab Saudi melampaui Rusia untuk menjadi pemasok minyak terbesar ke Tiongkok, dengan ekspor minyak tahunan senilai 35,5 miliar dolar, mewakili 17,4% dari total impor minyak Tiongkok (OEC). Iran juga merupakan negara pengekspor minyak besar lainnya, meskipun menghadapi sanksi berat dari Amerika Serikat pada saat itu, menyumbangkan \$6,29 miliar dolar AS (USD) dalam bentuk ekspor minyak ke Tiongkok pada tahun 2020, mewakili 50,9% dari total ekspor minyak Iran pada tahun tersebut (OEC).

Artikel jurnal ini memberikan kontribusi awal bagi peneliti dalam melihat Tiongkok dalam menengahi konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran. Mulai dari inisiatif yang diciptakan Tiongkok, hingga strategi untuk meredakan konflik dan tidak berpihak. Terdapat perbedaan antara artikel jurnal ini dengan

penelitian dalam tujuan penulisan, yaitu artikel jurnal ini melihat bagaimana upaya Tiongkok menjadi penengah dalam konflik Arab Saudi dan Iran sedangkan penelitian ini melihat perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi.

Referensi selanjutnya ialah artikel jurnal yang berjudul “*Analysis of Iran’s Reasons for Normalizing Diplomatic Relations with Saudi Arabia in 2023*” ditulis oleh Ana Aprillia & Haryo Prasodjo, dalam artikel jurnalnya ini dijelaskan bahwasannya hubungan antara Arab Saudi dan Iran yang sempat memiliki pengaruh buruk ketika pemerintah Riyadh memutuskan untuk mengeksekusi Sheikh Nimr al Nimr, seorang tokoh Syiah terkemuka, di Arab Saudi pada bulan Januari 2017.²⁰ Al Nimr didakwa memprovokasi masyarakat Arab Saudi untuk menentang kerajaan Arab Saudi. Hal ini membuat masyarakat Iran-kebanyakan pengikut Syiah-menyerang kedutaan besar Arab Saudi di Teheran. Dalam hal ini, Arab Saudi secara terang-terangan menentang langkah Iran dengan memaksimalkan dukungannya kepada kelompok pemberontak. Disaat terjadinya konflik antara Arab Saudi dan Iran pada Tahun 2017, kemudian beberapa negara mencoba untuk mendamaikan hubungan mereka dan pada akhirnya Tiongkok berhasil menjadi penengah diantara kedua negara ini.

Setelah 15 tahun Iran mendapatkan sanksi ekonomi, lima anggota tetap dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa (DK PBB) bersama Iran dan Jerman menandatangani (JCPOA) *Joint Comprehensive Plan of Action*. Perjanjian yang bertujuan untuk memastikan bahwa dalam kurun 10 tahun perkembangan nuklir di Iran dilakukan untuk tujuan perdamaian. Sementara itu kekuatan ekonomi Arab

²⁰ Ana Aprillia dan Haryo Prasodjo, “Analysis of Iran’s Reasons for Normalizing Diplomatic Relations with Saudi Arabia in 2023,” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 6, no. 1 (2023): 55–70, <https://doi.org/10.20885/ijis.vol6.iss1.art3>.

Saudi, terutama dalam produk minyak mentah, merupakan alasan Iran membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Arab Saudi.

Artikel jurnal ini berkontribusi atas penelitian ini dalam memahami bagaimana kondisi dari masing-masing negara konflik ini yang akhirnya bersedia untuk menjalin hubungan diplomatik kembali. Terdapat banyaknya tekanan internasional terhadap Iran yang akhirnya Iran memutuskan untuk berdamai. Perbedaan utama antara artikel jurnal ini dengan penelitian ini ialah pada bagian topik yang dibahas dan negara yang di analisis, sedangkan penelitian ini melihat apa faktor alasan yang memengaruhi terjadinya perubahan kebijakan normalisasi hubungan diplomatik oleh Arab Saudi.

Selanjutnya ada referensi dari artikel jurnal yang berjudul "*Pyongyang's failure: explaining North Korea's inability to normalize diplomatic relations with The United States*" yang ditulis oleh Ramon Pacheco Pardo. Normalisasi hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat merupakan tujuan kebijakan luar negeri Korea Utara dalam jangka panjang, sejak tahun 1974.²¹ Memang empat presiden Amerika Serikat antara tahun 1992 dan 2019 telah mencapai kesepakatan dengan Korea Utara yang secara eksplisit merujuk pada normalisasi diplomatik. Meskipun Korea Utara mulai menormalkan hubungan diplomatik bilateral dengan Amerika Serikat dan baru menjadi tujuan realistis setelah berakhirnya perang dingin. Namun pada Januari 2021 Pyongyang telah gagal mencapai tujuan ini.

Sementara itu, negara-negara Komunis yang tersisa telah menjalin hubungan diplomatik dengan Washington, seperti halnya negara-negara nuklir lainnya. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan Komunis dan pengembangan senjata nuklir tidak

²¹ Ramon Pacheco Pardo, *Pyongyang's Failure: Explaining North Korea's Inability to Normalize Diplomatic Relations with the United States*, dalam *Asia Policy*, vol. 16, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1353/asp.2021.0005>.

dapat menjelaskan kegagalan Korea Utara. Meskipun ada empat perjanjian terpisah yang secara eksplisit menyatakan pembentukan hubungan bilateral sebagai tujuan, hal ini belum terjadi. Kegagalan Korea Utara dapat dijelaskan oleh pilihan alat tawar-menawar yang buruk. Sebagai negara lemah yang melakukan tawar-menawar dengan negara besar, Korea Utara memiliki seperangkat taktik yang tersedia untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Singkatnya, taktik-taktik tersebut adalah: penyalarsan dalam bentuk penyeimbangan keras (*hard balancing*), penyeimbangan lunak (*soft balancing*), atau ikut-ikutan (*bandwagoning*); dan partisipasi dalam rezim internasional.

Artikel jurnal ini berkontribusi atas penelitian ini dalam memahami bagaimana kondisi internal Korea Utara saat melakukan tawar-menawar yang buruk dengan Washington. Sebagai negara lemah yang bernegosiasi dengan negara yang lebih kuat, Korea Utara dapat memilih apakah akan melakukan soft balance atau ikut-ikutan, apakah akan menggunakan taktik brinkmanship, dan apakah akan melibatkan diri dengan rezim multilateral. Berdasarkan budaya politiknya, pilihan yang paling umum diambil oleh Korea Utara adalah komitmen yang lemah untuk melakukan keseimbangan lunak, termasuk dengan Korea Selatan; penggunaan sikap keras; dan penolakan terhadap rezim internasional. Pilihan-pilihan ini telah memusuhi pemerintahan Amerika Serikat yang berurutan, sehingga menghalangi Korea Utara untuk mencapai normalisasi diplomatik.

Pembahasan tentang tawar-menawar secara umum setuju bahwa negara yang lemah akan memilih ikut-ikutan untuk menahan ancaman dari negara yang kuat. Akan tetapi, taktik ini tidak dapat dilakukan oleh Korea Utara kecuali jika Korea Utara bersedia untuk melepaskan persekutuanannya dengan Tiongkok dan mendekat

ke Korea Selatan. Pertama-tama, Korea Selatan adalah sekutu lama Amerika Serikat. Oleh karena itu, secara realistis hanya rekonsiliasi antar-Korea yang akan memungkinkan Pyongyang untuk bergabung dengan Washington. Selain itu, Tiongkok tidak mungkin memutuskan aliansinya dengan Korea Utara selama pasukan Amerika Serikat terus ditempatkan di Semenanjung Korea. Korea Utara berfungsi sebagai negara penyangga yang berguna. Mengingat bahwa tidak ada prospek segera bagi Amerika Serikat untuk memindahkan semua pasukannya dari Korea Selatan, maka taktik ikut-ikutan menjadi kurang realistis. Sedangkan untuk soft balancing, taktik ini dapat membantu Korea Utara membawa Amerika Serikat ke meja perundingan atau menahan tekanan, tetapi tidak cukup untuk membuat Washington mencapai kesepakatan. Selain itu, Pyongyang tidak selalu berkomitmen penuh untuk melakukan *soft balancing* sejak awal. Sementara itu, literatur yang ada mengenai perilaku tawar-menawar menunjukkan bahwa negara-negara yang lemah cenderung menggunakan mekanisme internasional karena mekanisme ini memaksimalkan pengaruh diplomatik negara yang lebih lemah dan memberikan tekanan kepada negara yang kuat. Pengalaman dari pembicaraan enam pihak menunjukkan bahwa inilah yang terjadi. Amerika Serikat, misalnya, merasa tertekan untuk menerima pernyataan bersama pada bulan September 2005. Tetapi, Korea Utara tidak sepenuhnya menggunakan perundingan itu pada tahun 2007-8 ketika pemerintahan Bush tampaknya bersedia menerapkan isi pernyataan bersama itu, tetapi malah bergerak ke arah bilateralisme. Oleh karena itu, Korea Utara tidak pernah sepenuhnya merangkul multilateralisme. Setelah mencapai tujuannya untuk menjadi kekuatan nuklir, Korea Utara akan terus berusaha untuk menormalkan hubungan diplomatik

dengan Amerika Serikat sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri. Untuk itu, Korea Utara harus memilih di antara sejumlah taktik tawar-menawar yang tersedia. Sampai saat ini, Pyongyang belum dapat menemukan kombinasi taktik yang tepat untuk membuat Amerika Serikat menyetujui normalisasi, siapa pun presiden Amerika Serikat yang berkuasa. Agar Pyongyang dapat mewujudkan tujuan tersebut, Pyongyang harus mempertimbangkan kombinasi yang belum pernah dicobanya, termasuk penyeimbangan yang lembut, tidak menggunakan sikap keras, dan partisipasi dalam setidaknya satu rezim internasional.

Referensi rujukan selanjutnya dalam penelitian ini adalah tulisan yang ditulis oleh Ni Nyoman Ayu Ratna Pramesti, Putu Ratih Kumala Dewi, dan A.A. Bagus Surya Widya Nugraha yang berjudul “Normalisasi hubungan diplomatik Turki dan Rusia pasca penembakan pesawat SU-24 Rusia oleh pasukan udara turki pada Tahun 2015-2016.”²² Dalam artikel jurnal ini dijelaskan bahwa upaya Turki untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Rusia telah didorong oleh faktor domestik dan juga internasional. Faktor kondisi ekonomi yang juga dilihat sebagai *diversionary tactics* dan kepentingan ekonomi menjadi faktor domestik utama yang mendorong keputusan Turki untuk melakukan normalisasi dengan Rusia. Hal tersebut dikarenakan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Rusia terhadap Turki utamanya menyasar pada kerjasama ekonomi kedua negara dan juga kehidupan perekonomian Turki. Kemudian faktor-faktor internasional seperti *deterrence*, *arm race*, formasi aliansi, *strategic surprise* dan faktor yang datang dari rezim

²² Ni Nyoman Ayu Ratna Pramesti dkk., “Normalisasi Hubungan Diplomatik Turki Dan Rusia Pasca Penembakan Pesawat Su-24 Rusia Oleh Pasukan Udara Turki Pada Tahun 2015- 2016,” *Jurnal Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana* 1, no. 2 (2019): 1–15.

lawan, menjadi faktor faktor penting yang mendorong Turki untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Rusia.

Hubungan baik antara turki dan rusia berlangsung cukup lama hingga akhirnya terjadi insiden penembakan pesawat yang secara tiba-tiba memecah hubungan baik antara kedua negara. Pada saat yang sama, salah satu pilot pesawat rusia tersebut diduga terbunuh oleh tembakan kelompok pemberontak Suriah saat terjun ke daratan. Turki segera membawa masalah ini ke agenda NATO, menyatakan bahwa aksi mereka adalah tindakan defensif dan menolak untuk meminta maaf kepada pihak Rusia atas tindakannya.

Pasca diberlakukannya sanksi Rusia terhadap Turki Hubungan diplomatik antara kedua negara secara efektif dibekukan dan sanksi-sanksi tersebut telah memberi kerugian dan juga tekanan bagi keadaan dalam negeri Turki. Hal ini mengingat kerjasama di sektor energi, konstruksi dan pariwisata merupakan ladang investasi utama antara Turki dan Rusia. Dampak – dampak yang diakibatkan oleh perselisihan Turki dengan Rusia sangat berpengaruh terhadap situasi Turki, baik dalam negeri maupun prestisenya di dunia internasional. Kerugian dan tekanan yang dihasilkan telah mengancam stabilitas dalam negeri Turki dan kemampuannya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya.

Artikel jurnal ini berkontribusi atas penelitian ini dalam memahami bagaimana kondisi antara dua negara sebelum mengalami pemutusan hubungan hingga kembali ke keadaan mengembalikan keadaan relasi antara dua negara sebagaimana mestinya. Upaya untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dipandang sebagai suatu proses pengakuan kebutuhan dan pengenalan langkah-langkah, dalam upaya mengurangi atau menyelesaikan ketegangan,

perselisihan, serta untuk mempromosikan peningkatan suatu hubungan, yang dilandasi oleh kepentingan mendesak dari negara yang bersangkutan.

Kebijakan Turki untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Rusia merupakan suatu keputusan akhir Turki dengan mempertimbangkan faktor-faktor domestik dan internasional tersebut. Memutuskan untuk berdamai dengan Rusia melalui normalisasi hubungan diplomatik akan dapat meminimalisir kerugian serta potensi ancaman yang di derita Turki akibat perselisihannya dengan Rusia. Dengan demikian Turki juga dapat menyesuaikan kepentingan nasional mereka dengan kembalinya kapabilitas ekonomi dan militer, serta persekutuannya yang kuat bersama Rusia.

Selanjutnya ada referensi dari artikel jurnal yang berjudul “*Normalization of Diplomatic Relations Between Saudi Arabia and Iran: A Rationality Analysis of Saudi Arabia’s Foreign Policy*” yang ditulis oleh Raihan Nustra Harsono dan Septifa Leiliano Ceria. Studi ini menggunakan teori Rational Actor model dari Graham T. Allison, yang dijelaskan dalam karyanya *Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis*.²³ Model ini menggambarkan bagaimana negara sebagai aktor utama bertindak rasional dalam membuat keputusan politik berdasarkan tujuan nasional. Keputusan diambil melalui evaluasi alternatif yang tersedia dan memilih opsi yang paling menguntungkan untuk mencapai kepentingan nasional (allison, 1997). Dalam konteks studi ini, teori ini diterapkan untuk menganalisis keputusan arab saudi dalam menormalisasi hubungan diplomatik dengan iran.

²³ Raihan Nustra Harsono dan Septifa Leiliano Ceria, *Normalization of Diplomatic Relations Between Saudi Arabia and Iran : A Rationality Analysis of Saudi Arabia ’ s Foreign Policy*, 4, no. 2 (2024): 84–96.

Selain teori aktor rasional, studi ini juga berlandaskan pada konsep Kepentingan Nasional seperti yang diungkapkan oleh Machiavelli (dalam bainus & rachman, 2018), yang menegaskan bahwa kepentingan nasional berkaitan erat dengan kekuatan negara. Dalam penelitian ini, kepentingan nasional Arab Saudi dikelompokkan menjadi tiga aspek utama: kepentingan keamanan regional, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik internasional.

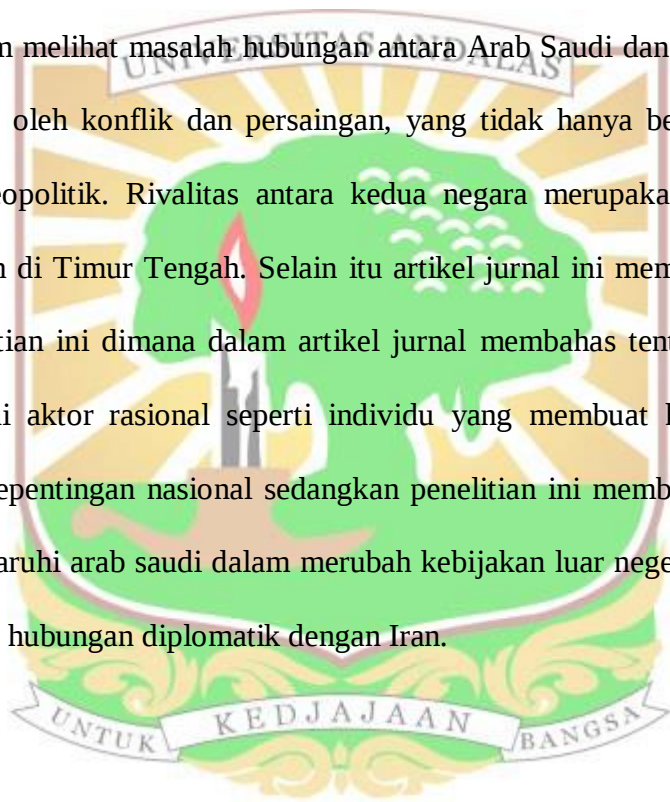
Penelitiannya sebelumnya yang relevan dengan topik ini menyoroti hubungan kompleks antara Arab Saudi dan Iran, terutama terkait konflik ideologis antara Sunni dan Syiah (mabon, 2015). Konflik ini sering diwujudkan dalam bentuk perang proksi di kawasan seperti Yaman dan Suriah (karakir, 2018), serta keterlibatan Iran dalam konflik Yaman melalui kelompok houthi (clausen, 2019). Upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan strategi, dari penggunaan kekuatan militer menuju pendekatan diplomatik dan ekonomi.

Keputusan Arab Saudi untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Iran dipandang sebagai kebijakan rasional yang selaras dengan tujuan utamanya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kekuatan nasional di kawasan, menjaga stabilitas regional, meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan posisi tawar Arab Saudi baik di tingkat regional maupun global. Langkah kebijakan ini dianggap paling rasional, menguntungkan, dan selaras dengan kepentingan nasional Arab Saudi, serta memiliki risiko yang minimal.

Analisis dengan menggunakan Model Aktor Rasional Graham T. Allison menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Arab Saudi pada tahun 2023 untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran merupakan keputusan yang

rasional. Kebijakan ini telah didasari oleh berbagai pertimbangan dan dinilai berdasarkan faktor-faktor tertentu, termasuk keamanan, kepentingan ekonomi, dan dinamika politik internasional. Rasionalitas kebijakan ini dibuktikan dengan beberapa manfaat bagi Arab Saudi, termasuk peningkatan keamanan dan pengaruh regional, promosi dan pemeliharaan stabilitas ekonomi, dan posisi yang lebih kuat di kancah internasional.

Artikel jurnal ini memiliki kontribusi yang besar dalam penelitian ini, terutama dalam melihat masalah hubungan antara Arab Saudi dan Iran yang telah lama diwarnai oleh konflik dan persaingan, yang tidak hanya bersifat ideologis tetapi juga geopolitik. Rivalitas antara kedua negara merupakan faktor utama ketidakstabilan di Timur Tengah. Selain itu artikel jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini dimana dalam artikel jurnal membahas tentang bagaimana negara sebagai aktor rasional seperti individu yang membuat keputusan logis berdasarkan kepentingan nasional sedangkan penelitian ini membahas apa faktor yang memengaruhi Arab Saudi dalam merubah kebijakan luar negerinya sehingga menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran.



1.7 Kerangka Konseptual

Dalam menjawab pertanyaan penelitian dan melakukan analisis atas penelitian yang berjudul “Perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi menormalisasi

hubungan diplomatik dengan Iran” maka peneliti menggunakan kerangka konseptual *Foreign Policy Change*.

1.7.1 *Foreign Policy Change*

Secara konseptual, kebijakan luar negeri dipahami sebagai tindakan otoritatif yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga aspek yang diinginkan dari lingkungan internasional atau mengubah aspek yang tidak diinginkan dengan perhitungan yang tepat dan orientasi tujuan yang jelas untuk memecahkan masalah atau mempromosikan beberapa perubahan dalam lingkungan internasional. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kebijakan luar negeri terdiri dari pernyataan dan tindakan yang diambil oleh subyek negara untuk hubungannya dengan aktor internasional yaitu negara atau aktor non-negara.²⁴

Menurut Duncan, tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara yaitu dapat dijelaskan dalam bentuk “hirarki” atau tingkatan, dibentuk oleh sekelompok aktor yang memiliki kewenangan dan pengaruh dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara. Tingkatan tujuan kebijakan luar negeri tersebut terdiri dari *Core Objectives*, *Middle-Range Objectives*, dan *Long-Range Objectives*.²⁵ *Core Objectives* merupakan tujuan kebijakan luar negeri yang berusaha untuk mencapai kepentingan vital, yaitu sektor keamanan teritorial, sektor kekuatan ekonomi, dan

²⁴ John Barkdull dan Paul G. Harris, “Environmental Change and Foreign Policy: A Survey of Theory,” *Global Environmental Politics* 2, no. 2 (2002): 63–91, <https://doi.org/10.1162/15263800260047835>.

²⁵ W. Raymond Duncan dkk., *World Politics In The 21st Century* (2008).

ketergantungan politik. *Middle Range Objectives*, yaitu ketika negara tetap menjadi *Core Objectives* sebagai tujuan utama namun juga mengejar tujuan jangka menengah yang dapat meningkatkan prestise mereka dalam sistem internasional dengan terlihat dalam organisasi internasional, pertukaran budaya mensponsori konferensi dan pertemuan para kepala negara, menjelajahi luar angkasa atau dengan bertukar delegasi diplomatik dengan negara-negara yang menjadi tujuan kebijakan luar negerinya. Dan yang terakhir, *Long-Range Objectives* yaitu merujuk pada promosi nilai dan norma-norma dasar yang dipercaya oleh suatu negara untuk disebarkan ke dunia internasional.²⁶

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan sebuah representasi sikap yang menggambarkan respon terhadap suatu isu yang terjadi di dunia internasional yang tidak bersifat tetap namun kebijakan luar negeri bersifat menyesuaikan dengan beberapa pertimbangan berdasarkan tujuan pemerintah atau negara saat itu atau dinamis. Oleh karena kebijakan luar negeri tersebut bersifat dinamis, maka untuk mengetahui mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah diperlukan beberapa faktor yang dapat dianalisis sehingga mendapatkan jawaban yang melatarbelakangi adanya perubahan kebijakan luar negeri tersebut. Dengan demikian perubahan kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai pergeseran, reorientasi, atau restrukturisasi kebijakan suatu negara dalam menjalankan hubungan luar negerinya.

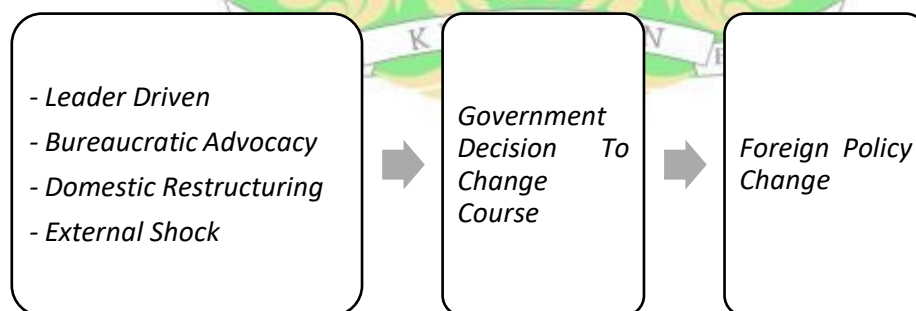
Oleh karena sifatnya yang dinamis dan fleksibel, perubahan kebijakan luar negeri tersebut selalu menyesuaikan dengan adanya input dan output dalam perumusan kebijakan luar negeri. Selain itu, beberapa entitas juga ikut menjadi

²⁶ Duncan dkk., *World Politics In The 21st Century*. Hal 135-139.

alasan mengapa sebuah kebijakan itu dapat berubah. Untuk itu, dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri, peneliti merujuk pada konsep *Foreign Policy Change* dari Charles F. Hermann yang mengklasifikasikan perubahan kebijakan luar negeri ke dalam empat level, yaitu:²⁷

1. *Adjustment Change*, merupakan perubahan dalam intensitas atau cakupan kebijakan yang sudah ada, tanpa mengubah tujuan atau instrumen intinya. Perubahan level ini lebih kepada bagaimana sebuah negara meningkatkan usaha mereka dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri negaranya.
2. *Program Change*, merupakan perubahan pada alat atau metode yang digunakan untuk mengejar tujuan yang sama.
3. *Goal/Problem Change*, mengubah tujuan utama atau mendefinisikan ulang masalah yang ingin diatasi oleh kebijakan luar negeri tersebut.
4. *International Orientation Change*, mengganti orientasi global negara. Misalnya, keluar dari aliansi atau mengubah blok politik.

Selanjutnya, Charles F. Hermann menjelaskan bahwa terdapat empat aktor/agen yang menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu:



Sumber: Herman, 1990

Bagan 1. 1 Bagan Konsep *Foreign Policy Change*

²⁷ Charles F. Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy," *International Studies Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3, <https://doi.org/10.2307/2600403>.

Dari bagan di atas akan dijelaskan, bagaimana empat aktor ini menjadi penyebab perubahan kebijakan luar negeri suatu negara.

a. *Leader Driven*

Perubahan Kebijakan Luar Negeri yang disebabkan oleh adanya visi misi dari pemimpin suatu negara yang kemudian diterapkan kedalam kebijakan luar negerinya karena hal tersebut dianggap perlu dilakukan untuk mengubah kebijakan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Charles F. Hermann menggunakan istilah *reconceptualization* untuk menggambarkan perubahan cara pandang seorang pemimpin dalam merespon sebuah isu atau fenomena. Pandangan tersebut berasal dari keyakinan dan nilai yang dianut yang telah ada baik sebelum ataupun ketika menjabat sebagai seorang pemimpin negara.

Menurut Hermann, ada tiga nilai yang menyebabkan seorang pemimpin negara bisa mereorientasi kebijakan luar negerinya, yaitu *Conviction*, *Energy*, dan *Power*. *Conviction* (keyakinan) merupakan adanya suatu *strong belief on the part of leader* yang telah lama diyakininya tidak perlu pembuktian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kemudian *energy* (energi), merupakan keyakinan yang kuat harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai bagian dari usaha untuk melakukan perubahan kebijakan. Pemimpin tersebut juga memperlihatkan upaya dan pendekatan tersebut akan terlihat di awal masa pemerinthan seorang pemimpin, sehingga seorang pemimpin dianggap mempunyai energi ketika telah melakukan upaya dan pendekatan sebelum melakukan perubahan kebijakan dan bersiap menghadapi perlawanan dari

pihak oposisi hingga kehilangan kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin.²⁸

Lalu *Power* (kekuatan), merupakan kemampuan dan pengalaman pemimpin dalam menjabat sebagai seorang kepala negara termasuk dari partai atau koalisi mana pemimpin tersebut berasal. Kemampuan seorang pemimpin dalam menjelaskan suatu isu terhadap oposisi partai dan perwakilan rakyat juga menjadi bagian *power* yang dimiliki seorang pemimpin.

b. *Bureaucratic Advocacy*

Bureaucratic Advocacy merupakan entitas yang berasal dari dalam pemerintahan suatu negara yang terlibat dalam memberikan pandangan, opsi kebijakan dan entitas ini mendukung adanya penyesuaian dalam kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemimpin suatu negara. Menurut Hermann, kelompok ini berada dalam lingkaran eksekutif yang bersentuhan langsung dengan urusan luar negeri suatu negara. Kelompok ini dianggap lebih mampu mengadvokasi *decision maker* mengenai efektif atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan.

c. *Domestic restructuring*

Domestic Restructuring merupakan kelompok masyarakat yang melekat terhadap suatu isu, baik isu domestik maupun isu internasional. Kelompok ini bisa menjadi agen ataupun target dari kebijakan pemerintah sehingga dalam prosesnya nanti suara ataupun pandangan mereka dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan sebuah kebijakan sesuai dengan input yang masuk kepada pemerintah. Kelompok ini juga bisa memiliki pengaruh dalam menanggapi suatu isu sehingga pandangan mereka

²⁸ Fredrik Doeser, "Leader-driven foreign-policy change: Denmark and the Persian Gulf War," *International Political Science Review* 34, no. 5 (2013): 582–97, <https://doi.org/10.1177/0192512112473027>.

dijadikan pertimbangan sebagai generalisasi bagaimana masyarakat dalam memandang suatu isu. Hal ini biasanya dibuktikan dengan jejak pendapat, polling atau suara terbanyak ataupun metode sejenis, yang biasanya diperoleh melalui suatu survei, dan diolah berdasarkan data survei tersebut.

d. *External shock*

External Shock merupakan peristiwa, kejadian dan dorongan tuntutan yang berasal dari luar wilayah teritorial suatu negara yang kemudian menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan suatu pemerintah untuk merubah kebijakan luar negerinya. Peristiwa tersebut dapat memicu pemimpin untuk mengambil tindakan yang drastic atau memicu segmen-segmen masyarakat tertentu untuk menekan pemerintah melalui tuntutan agar pemerintah mempertimbangkan hal yang terjadi diluar sana sehingga akan diharapkan terjadi sebuah tindakan melakukan perubahan kebijakan. Sehingga domestik maupun eksternal memiliki pengaruhnya masing-masing dalam menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri dan kepala pemerintahannya harus berusaha menyeimbangkan antara tuntutan internal dan tekanan yang diberikan oleh dunia internasional.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan variabel yang dapat diindikasikan sebagai komponen *External Shocks* yang menjadi faktor penyebab perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi menormalisasi hubungan diplomatik terhadap Iran. Dengan demikian, peneliti menggunakan indikator alternatif, yaitu faktor eksternal sebagai bagian dari alat analisis untuk mendapatkan jawaban dari penelitian ini, yaitu rivalitas dari Iran. Iran menjadi sebuah ancaman bagi kawasan timur tengah karena dianggap kerap

melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan internasional dalam bidang keamanan dan juga dicurigai sebagai dalang terhadap beberapa pemberontakan seperti Houthi di Yaman, dan peristiwa *nine eleven*.

Dengan menggunakan konsep perubahan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Change*) yang dikemukakan oleh Charles F. Hermann ini, penulis akan menjawab pertanyaan penelitian tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran. Berdasarkan konsep tersebut, penulis akan menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap Iran yang menyebabkan terjadinya normalisasi hubungan diplomatik melalui empat faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan sehingga menghasilkan sebuah kebijakan.

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari bahan tertulis berupa tulisan yang diperoleh dari pernyataan resmi, dokumen dan penelitian sebelumnya ataupun data sekunder lainnya. Menurut Boogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati.²⁹

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian eksplanatif dimana penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, menyelidiki,

²⁹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Metode Penelitian Kualitatif*, dalam *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, no. 1 (2019).

dan menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan variabel independen guna menelaah penyebab suatu fenomena terjadi. Penelitian ini menggunakan konsep *Foreign Policy Change* oleh Charles F. Hermann untuk melihat perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi sehingga menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran.

1.8.2 Batasan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memberikan batasan penelitian supaya hasil dan proses dalam penelitian dapat bersifat spesifik, terarah dan dapat dianalisis dengan lebih baik. Batasan masalah juga dimaksudkan agar konsistensi peneliti terjaga agar tulisan tidak melebar. Batasan waktu dalam penelitian ini difokuskan pada tahun 2016-2023. Pada tahun 2016 merupakan tahun di mana warga Iran melakukan demonstrasi yang berujung pada penyerangan kantor kedutaan Arab Saudi di Teheran dengan melempar bom botol dan taksi yang mereka tabrakkan di gedung konsuler Arab Saudi di Masyhad akibat dari eksekusi mati seorang ulama yang menganut pemahaman Syiah Yakni Nimr Al-Nimr oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian Arab Saudi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatiknya. Sedangkan pada tahun 2023 menjadi batasan akhir pembahasan mengenai perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi yang berkaitan dengan normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada upaya menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis diartikan sebagai objek yang perilakunya hendak diteliti atau disebut juga dengan variable dependen. Kemudian terdapat unit eksplanasi yaitu objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Iran, sementara unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi yang menyebabkan Arab Saudi melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran. Kemudian untuk level analisis sendiri merupakan entitas sosial spesifik yang menjadi target dalam sebuah penelitian. Sehingga jika merujuk pada latar belakang dan konsep yang digunakan, peneliti menggunakan lever negara, karena dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana negara dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negerinya sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

1.8.4 Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara library research atau biasa disebut sebagai studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi mendukung yang bukan berasal dari sumber pertama atau yang disebut sebagai data sekunder. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur

Ilmiah.³⁰ Data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, portal berita yang kredibel, dokumen resmi pemerintah terkait, hingga berbagai informasi dan berita yang didapatkan berasal dari media yang kredibel dan terpercaya keabsahan nya dan relevan dengan penelitian yang akan diteliti.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menjawab dan melakukan analisis atas pertanyaan penelitian di sini peneliti akan menggunakan tiga tahapan dalam melakukan analisis data:

1. Pengumpulan Data/Persiapan

Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan dan pencarian data yang sesuai dengan masalah yang diangkat, data dapat berupa kumpulan informasi yang berasal dari artikel jurnal, buku, informasi dari berita, koran, dan berbagai informasi yang berasal dari media sosial yang kredibel dan dapat membantu penarikan kesimpulan.

2. Reduksi dan Interpretasi Data

Dari banyaknya data yang sudah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan pengelompokan, pemilahan, dan penyederhanaan data dan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Data – data yang sudah dikelompokkan kemudian dianalisis, hingga mengelompokkan dengan menggunakan pendekatan teoritis yang sudah ditentukan sebelumnya atas masalah yang terjadi.

3. Pengambilan Kesimpulan

³⁰ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (2013).

Setelah semua data terkumpul mulai dari data yang penting hingga yang data tambahan lainnya, barulah data dan informasi yang sudah ditemukan dianalisis berdasarkan teori dan pendekatan yang diterapkan kemudian mengambil kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab masalah dan pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini secara umum merupakan metodologi penulisan yang tersusun atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI TERHADAP IRAN

Bab ini menjelaskan bagaimana dinamika kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap Iran, mulai dari fondasi diplomatik awalnya hingga era “Twin Pillars” (Dua Pilar) kerja sama Arab Saudi-Iran. Hingga intensifikasi persaingan mulai dari invasi ke Irak yang dipimpin Amerika pada tahun 2003 hingga keputusan penting pada Januari 2016, ketika Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

BAB III NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK ARAB SAUDI DENGAN IRAN TAHUN 2023

Pada bab ini penelitian yang dilakukan menjelaskan secara kronologis seperti apa normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran. Hal ini penting untuk dijelaskan seperti apa normalisasi yang dilakukan sebelum menganalisis alasan mengapa Arab Saudi akhirnya menyepakati normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran.

BAB IV ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI MENORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK TERHADAP IRAN

Dalam bab ini penelitian yang dilakukan yaitu menganalisis faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi dari pendekatan konfrontatif menuju normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran. Analisis dilakukan menggunakan teori *foreign policy change* dari Charles F. Hermann, yang menekankan peran faktor internal, dan faktor eksternal.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan terdapat kesimpulan yang diberikan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diberikan terkait penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh penelitian berikutnya atau sebagai rekomendasi terkait topik penelitian yang sama atau yang berkaitan dengan foreign policy change.

